

# **LAMPIRAN**

## **PETUNJUK PENGISIAN**

1. Kuesioner ini merupakan penelitian skripsi penulis pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2017
2. Judul skripsi penulis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat citizenship masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2015 (studi kasus Kota Mataram)
3. Mohon Bapak/Ibu dan Saudara memilih salah satu jawaban yang tepat dengan melingkari a, b, c, d, dan e.
4. Kuesioner tidak bertujuan untuk hal yang bersifat politik dan ekonomis, serta jawaban responden tidak akan dipublikasikan siapa yang menjawab.
5. Kuesioner ini hanya untuk kelulusan penulis pada jenjang kuliah Strata 1
6. Demikian dan terimakasih.

Yogyakarta, 31 Oktober 2017

Penulis

Baiq Laras Paramudita

## KUISIONER

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan masyarakat memiliki kebebasan memilih dan menentukan siapa yang menjadi pemimpin daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Biasa Saja
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju Sama Sekali

Keterangan : .....

.....

.....

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan masyarakat mempunyai hak untuk menjadi calon pemimpin daerah dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Biasa Saja
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju Sama Sekali

Keterangan : .....

.....

.....

3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan masyarakat memiliki kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk hadir dan ikut serta dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Biasa Saja

- d. Kurang Setuju
- e. Tidak Setuju Sama Sekali

Keterangan : .....

.....

.....

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan masyarakat memiliki kewajiban mengontrol dan mengawasi pemimpin yang terpilih pada pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Biasa Saja
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju Sama Sekali

Keterangan : .....

.....

.....

5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan masyarakat yang menerima sejumlah uang menjelang hari pemungutan suara mempengaruhi hak pilih masyarakat tersebut dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Biasa Saja
  - d. Kurang Setuju
  - e. Tidak Setuju Sama sekali

Keterangan : .....

.....

.....

6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan masyarakat yang sudah diberikan uang saat menjelang pemungutan suara berani memilih calon lain yang tidak memberikan uang pada pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?
- a. Berani
  - b. Tidak tahu
  - c. Tidak berani

Keterangan : .....

.....

.....

7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan masyarakat memilih calon yang menjanjikan fasilitas individu/umum dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?
- a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Biasa saja
  - d. Kurang setuju
  - e. Tidak setuju sama sekali

Keterangan : .....

.....

.....

8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan masyarakat memilih calon lain yang tidak menjanjikan fasilitas individu/umum dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?
- a. Sangat setuju
  - b. Setuju

- c. Biasa saja
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju sama sekali

Keterangan : .....

.....

.....

9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan figur tokoh yang menjadi calon mempengaruhi masyarakat dalam memilih di pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Biasa saja
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju sama sekali

Keterangan : .....

.....

.....

10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan visi-misi tokoh yang menjadi calon mempengaruhi masyarakat dalam memilih di pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Biasa saja
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju sama sekali

Keterangan : .....

.....

.....

11. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan tokoh yang menjadi calon adalah tokoh intelektual (secara keilmuan dan keserjanaan) memengaruhi masyarakat dalam memilih di pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Biasa saja
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju sama sekali

Keterangan : .....

.....

.....

12. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan tokoh yang menjadi calon bukan tokoh intelektual (secara keilmuan dan keserjanaan) mempengaruhi masyarakat dalam memilih di pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Biasa saja
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju sama sekali

Keterangan : .....

.....

.....

13. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan keterlibatan masyarakat karena pengaruh partai massa yang sudah terkenal dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Biasa saja
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju sama sekali

Keterangan : .....

.....

.....

14. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara keterlibatan masyarakat karena munculnya partai baru di pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Biasa saja
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju sama sekali

Keterangan : .....

.....

.....

15. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan keterlibatan masyarakat karena program partai yang mengusung mempengaruhi dalam memilih calon di pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Biasa saja



- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju sama sekali

Keterangan : .....

.....

.....

16. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dan Saudara dengan pengaruh dari kader partai mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon di pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Biasa saja
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju sama sekali

Keterangan : .....

.....

.....

## DAFTAR WAWANCARA

Anonimitas, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, 4 November 2017.

Anonimitas, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, 4 November 2017.

Anonimitas, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, 4 November 2017.

Anonimitas, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, 6 November 2017.

Anonimitas, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, 6 November 2017.

Anonimitas, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, 7 November 2017.

Anonimitas, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, 8 November 2017.

Anonimitas, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, 8 November 2017.

Anonimitas, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, 8 November 2017.

Anonimitas, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, 8 November 2017.



Yogyakarta, 1 November 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9071/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Nusa Tenggara Barat  
Up. Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik Dalam Negeri  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Di

MATARAM

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 21/A.2-VIII/X/2017  
Tanggal : 27 Oktober 2017  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Tulisan Ilmiah/ Skripsi dengan judul proposal: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT CITIZENSHIP MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 (STUDI KASUS KOTA MATARAM)”** kepada :

Nama : BAIQ LARAS PARAMUDITA  
NIM : 20140520121  
No. HP/Identitas : 082242978120 / 6401066609960001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas/PT : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Waktu Penelitian : 2 November 2017 s.d. 11 November 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Jalan Pendidikan Nomor 2 Mataram kode pos.83125

Tlp. / Fax. (0370) 7505330

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/12279 / XI / R / BKBDN / 2017

1. **Dasar** :
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  - b. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Nomor : 074/9071/Kesbangpol/2017, Tanggal 1 November 2017.  
Perihal : Rekomendasi Penelitian.
2. **Menimbang** :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **BAIQ LARAS PARAMUDITA.**  
Alamat : Krayan Bahagia RT. 008 RW. -, Krayan Bahagia, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur / No. Telp. 082242978120 / No. Identitas. 6401066609960001.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Bidang/Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT CITIZENSHIP MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 (STUDI KASUS KOTA MATARAM).**  
Lokasi : Kota Mataram.  
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang.  
Lamanya : 1 (satu) Bulan, November 2017.  
Status Penelitian : Baru
3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti** :
  - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
  - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI;
  - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
  - e. **Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpolagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 10 November 2017  
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB  
Sekretaris

  
**Drs. KATARUDDIN, MH**  
NIP. 19611231 198503 1 175

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di - Mataram;
2. Walikota Mataram Cq. Ka. Kesbangpol Kota Mataram di - Mataram;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

## 1. KONDISI EKSISTING KOTA MATARAM

### a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 Km<sup>2</sup> (6.130 Ha) dan 56,80 Km<sup>2</sup> perairan laut serta garis pantai sepanjang 9 km. Luas wilayah Kota Mataram tersebut hanya 0,30 persen dari luas Provinsi NTB secara keseluruhan yaitu 20.153,15 Km<sup>2</sup>, sehingga menjadikan Kota Mataram sebagai kota dengan wilayah terkecil dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB.

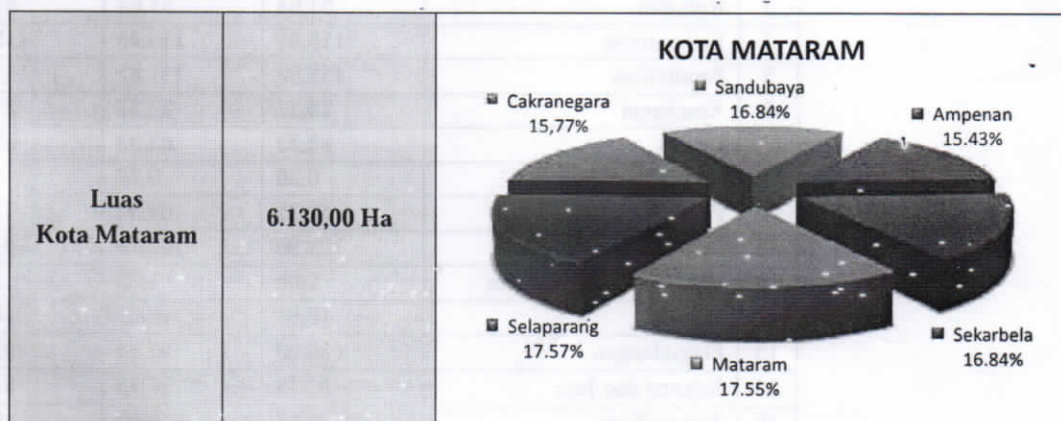
Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah kecamatan, 50 kelurahan dan 325 lingkungan, dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Selaparang dengan luas 10,77 km<sup>2</sup> dan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah 9,46 km<sup>2</sup>, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
Ampenan	10	55	9,46	15,43
Cakranegara	10	73	9,67	15,77
Sekarbela	5	36	10,32	16,84
Mataram	9	55	10,76	17,55
Selaparang	9	61	10,77	17,57
Sandubaya	7	45	10,32	16,84
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>325</b>	<b>61,30</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Mataram, 2016

Secara lebih rinci, luas wilayah Kota Mataram menurut kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: BPS Kota Mataram, 2016

### b. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok dan secara astronomis terletak pada posisi antara 08°33' dan 08°38' Lintang Selatan dan antara 116°04' dan 116°10' Bujur Timur, dengan panjang garis pantai 9 km.

### c. Penggunaan Lahan

Sebagai Ibukota provinsi, pola guna lahan di Kota Mataram dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berkembang secara linier, konsentrik, dan parsial. Perkembangan pola linear terjadi karena tata guna lahan mengikuti pola jaringan jalan seperti pada koridor utama Kota Mataram di Jalan Yos Sudarso – Jalan Langko – Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya. Perkembangan guna lahan secara konsentrik yang berbentuk *grid* (mengelompok) seperti yang tersebar di Kawasan Cakranegara dan sekitarnya. Sedangkan, pola guna lahan yang berkembang secara parsial terjadi di Kelurahan Rembiga, Sayang-Sayang di bagian utara, Kelurahan Jempong Baru, Pagutan, dan pusat permukiman di Kawasan Bertais. Pada pola linier, konsentrik, dan parsial tersebut terjadi penyatuan guna lahan, sehingga terbentuklah kawasan terbangun yang telah berkembang seperti saat ini.

Dalam perkembangannya konversi lahan sebagian besar untuk fungsi perumahan, perkantoran, pendidikan serta untuk pertokoan. Hal ini tentunya terjadi dengan semakin pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan Kota yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk pengembangannya. Penggunaan lahan diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 4** Penggunaan Lahan Menurut Kesesuaian dengan RUTR (Ha)

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)			
		2012	2013	2014	2015
1	Perumahan	2.352,18	2.401,12	2.414,48	2.426,64
2	Lapangan Olahraga	46,10	46,10	46,10	46,10
3	Kuburan	51,64	51,64	51,64	51,64
4	Perkantoran	115,45	115,45	115,45	116,13
5	Pendidikan	151,82	151,82	151,82	152,47
6	Kesehatan	23,37	23,37	23,37	23,62
7	Ibadah	63,33	63,33	63,33	63,33
8	Jasa	0,26	0,26	0,38	0,38
9	Pasar/Terminal	68,35	68,35	68,35	68,35
10	Pertokoan/SPBU	101,98	102,78	104,57	104,98
11	Warung/Rumah Makan	1,06	1,55	1,55	1,55
12	Hotel	18,91	18,91	18,91	19,22
13	Pergudangan	50,60	52,24	52,24	2,39
14	Industri dan Jasa	51,75	51,75	51,75	51,75
15	Taman Kota	6,07	6,07	6,07	6,07
16	Tanah Diperuntukan	125,82	125,88	129,88	129,88
17	Tanah Pertanian	2.819,42	2.763,49	2.748,22	2.733,62
18	Tanah Tidak Diusahakan	81,89	81,89	81,89	81,89
<b>Kota Mataram</b>		<b>6.130,00</b>	<b>6.130,00</b>	<b>6.130,00</b>	<b>6.130,00</b>

Sumber: BPS Kota Mataram dan BPN Kota Mataram, 2016

Neraca Perubahan penggunaan lahan di Kota Mataram tahun 2015 antara lain luas perubahan pada perumahan mengalami peningkatan sebesar 12,164 di tahun 2015 untuk perkantoran terjadi peningkatan sebesar 0,68 begitu juga untuk pendidikan mengalami peningkatan sebesar 0,65 dan yang paling signifikan terjadi pengurangan di tahun 2015 ini adalah di jenis penggunaan tanah pertanian berkurang sebesar 114,59.

#### **d. Potensi Pengembangan Wilayah**

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Sementara, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi.

Secara kewilayahan Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam RTRW Kota Mataram, dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama adalah:

- 1) Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan jasa serta pariwisata;
- 2) Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan;
- 3) Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis.

#### **e. Kondisi Demografis**

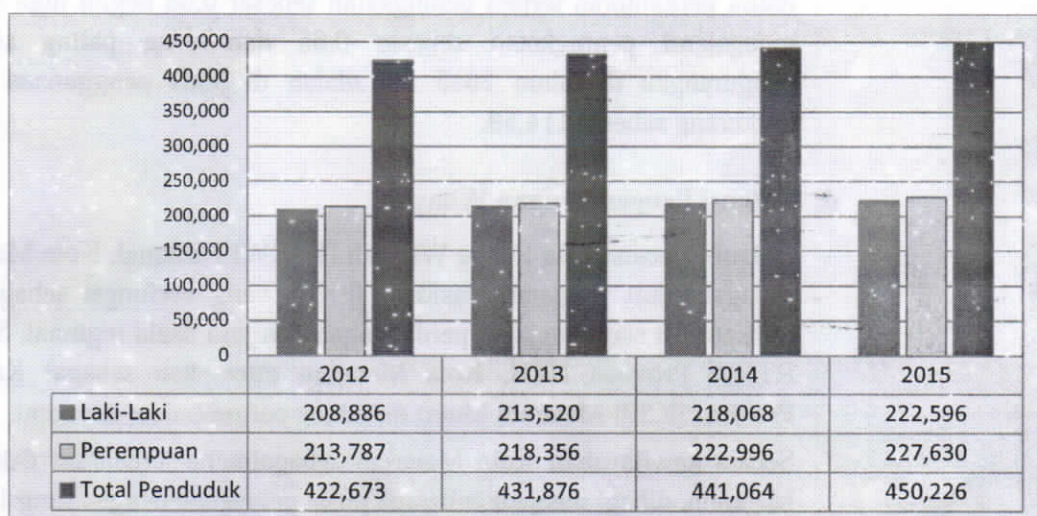
Demografi meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat peristiwa kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi atau tidak resmi yang diterbitkan oleh badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain-lain.

Kota Mataram merupakan daerah otonom dengan luas wilayah terkecil di Provinsi NTB, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif besar. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Mataram sebesar 450.226 jiwa dan didominasi oleh penduduk perempuan dengan selisih antara penduduk perempuan dan laki-laki 5.034 jiwa.

Jumlah penduduk mengalami peningkatan 9.162 jiwa dari tahun sebelumnya. Besarnya jumlah penduduk tersebut di satu sisi dapat menjadi potensi Sumber Daya Manusia bagi pembangunan Kota Mataram di segala bidang, namun di sisi yang lain banyak kebutuhan sosial kemasyarakatan yang harus dipenuhi.

Lebih jelas mengenai gambaran komposisi jumlah penduduk Kota Mataram tahun 2012 hingga tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

**Grafik 1**  
**Jumlah Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2012 – 2015**



Sumber : BPS Kota Mataram, 2015

Jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan sebagian dari masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan. Tingginya tingkat migrasi penduduk ke Kota Mataram menjadikan jumlah penduduk Kota Mataram terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebab tingginya migrasi penduduk ke Kota Mataram adalah kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai ibukota provinsi, PKN, KSP, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa.

Adapun gambaran pertumbuhan penduduk dirinci per Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Ampenan	89.421	9.453
2	Sekarbela	67.431	6.534
3	Mataram	85.491	7.945
4	Selaparang	75.027	6.966
5	Cakranegara	67.395	6.969
6	Sandubaya	74.549	7.224
<b>Jumlah</b>		<b>459.314</b>	<b>7.493</b>

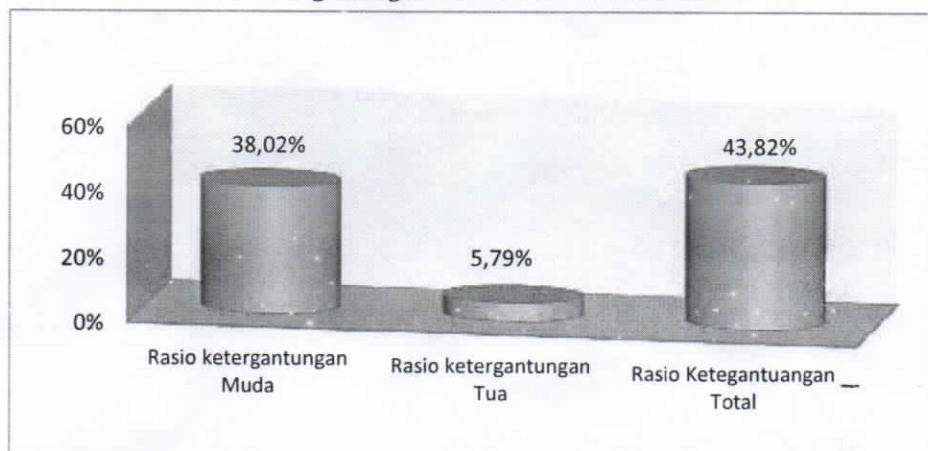
Sumber: BPS Kota Mataram, 2016

Penyebaran penduduk di Kota Mataram masih terkonsentrasi di Kecamatan Ampenan yaitu 89.421 jiwa. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan penduduk, maka Kecamatan Sekarbela memiliki pertumbuhan penduduk yang paling tinggi dibanding dengan kecamatan lainnya yaitu 3,9%.



Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Mataram dengan membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio ketergantungan penduduk sebesar 45%, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Mataram yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar 44 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi, terdiri dari rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 39% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 6%. Sehingga kebijakan dan program perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar maupun pendidikan. Rasio ketergantungan penduduk Kota Mataram tahun 2015, sebagaimana Tabel berikut:

**Grafik 2**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram**



Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

### 3.3. PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH KOTA MATARAM

Hasil dari capaian berdasarkan program prioritas di Kota Mataram yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode RPJMD sebelumnya (tahun 2011-2015), serta mempertimbangkan Janji Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2021, disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Upaya mewujudkan komitmen pembangunan dengan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau warga Kota Mataram, dilakukan dengan memastikan bahwa setiap Visi & Misi RPJMD dapat dijalankan oleh seluruh SKPD yang bertanggungjawab atas pencapaiannya. Konsep pembangunan **Mataram untuk Semua (Mataram for All)** dapat tercapai, melalui penekanan pada program/kegiatan pembangunan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat dan mengatasi setiap permasalahan.

Tantangan pembangunan Kota Mataram sebagai Kota Heterogen dengan karakter masyarakat yang majemuk, antara lain: